

SOAL DUGAAN KORUPSI BALIHO, SEKOT MENGHINDAR



Siwalimana

Sekretaris Kota (Sekot) Ambon, A.G. Latuheru menghindar saat dikonfirmasi soal Dugaan Korupsi Proyek Pencetakan Spanduk Dan Baliho Tahun 2019 senilai Rp1,5 miliar. Dugaan korupsi itu dilaporkan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) LIRA Maluku ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku. A.G. Latuheru enggan berkomentar, Ia meminta ditanyakan ke LIRA. “Tanyakan ke LIRA jangan ke saya,” tandas A.G. Latuheru dengan nada tinggi, di Balai Kota Ambon, Jumat (9/10). Ketika ditanya apakah siap memenuhi panggilan jaksa, lagi-lagi A.G. Latuheru enggan menjawab. Ternyata alasannya, laporan ke Kejati Maluku tidak ada tembusan ke dirinya. “Jangan tanyakan ke saya, tanyakan LIRA, ketika berikan laporan tersebut adakah tembusan ke saya? Kan tidak jadi tanyakan ke LIRA saja,” tandasnya.

Berbagai kalangan meminta Kejati Maluku serius mengusut Laporan Dugaan Korupsi Proyek Pencetakan Baliho dan Spanduk 2019 di Pemkot Ambon. “Pihak kejaksaan harus serius,” tandas Praktisi Hukum Djidon Batmamolin, Minggu (11/10). Dikatakan, penegak hukum memiliki kewajiban melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana,. “Undang-Undang memberikan ruang untuk mereka. Kalau ada dugaan penyalahgunaan itu, maka itu harus diproses,” ujarnya.

Hal yang sama juga disampaikan Praktisi Hukum Nelson Sianressy. Ia meminta pimpinan kejaksaan serius, jangan tebang pilih. “Siapapun dia, apapun jabatannya, harus diproses hukum,” tandasnya. Menurutnya, tidak ada yang kebal hukum. Siapapun yang terlibat dalam kasus korupsi adalah musuh negara, sehingga, mereka harus ditindak. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ambon, Saidna Azhar Bin Taher meminta Kejati Maluku serius mengusut dugaan korupsi percetakan dan spanduk baliho. “Kita mendukung untuk penegak hukum mengusut

tuntas masalah ini,” ujarnya. Diharapkan, laporan LIRA diusut tuntas. Jangan diusut, kemudian dihentikan. Seperti Kasus Proyek Tugu Trikora. “Kita inginkan agar kasus ini dapat diusut tuntas,” tandasnya.

Ditelaah Jaksa

Seperti diberitakan, Kejati Maluku tengah menelaah Dugaan Korupsi Proyek Pencetakan Baliho dan Spanduk senilai Rp1,5 miliar Tahun 2019 di Pemkot Ambon yang dilaporkan LSM LIRA Maluku. “Benar, laporannya sudah masuk. Kasusnya masih dalam proses telaah. Jadi sebaiknya diikuti saja proses yang saat ini sedang dilakukan,” kata Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Hubungan Masyarakat (Kasi Penkum dan Humas) Kejati Maluku, Samy Sapulette, Kamis (8/10).

Samy Sapulette mengatakan, laporan yang disampaikan tetap diproses dan saat ini masih ditelaah. “Masih ditelaah. Jadi ikuti saja dulu prosesnya,” ujarnya. Sebelumnya, LIRA melaporkan Sekretariat Pemkot Ambon sebagai pengelola proyek, bendahara pengeluaran yang disertai tugas untuk membiayai proyek dan Toko M3 Digital Printing sebagai pihak ketiga. “Kami sudah laporkan kasus dugaan penyalahgunaan anggaran ke Kejati Maluku sejak 5 Oktober lalu,” kata Direktur LSM LIRA Maluku, Jan Sariwating, Rabu (7/10).

Jan Sariwating mengatakan, para terlapor itu diduga telah melakukan perbuatan yang berpotensi menghambat pembangunan daerah serta merugikan keuangan daerah untuk meraup keuntungan yang tidak wajar atas pencetakan spanduk dan baliho. Dijelaskan, Pemkot Ambon menganggarkan dana untuk belanja jasa publikasi media cetak dan elektronik sebesar Rp15,8 miliar. Dana yang direalisasikan sebesar Rp15,6 miliar. Dari realisasi itu, Rp11,7 miliar dipakai untuk membiayai paket kegiatan penyelenggaraan pameran hasil-hasil pembangunan. Paket kegiatan itu seharusnya dikelola Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian. Namun entah kenapa diambil alih pengelolaannya oleh Sekretariat Pemkot Ambon. Padahal fungsi utama dari sekretariat adalah membantu dan mendukung kegiatan Walikota dalam menjalankan tugas pemerintahan. “Jadi tidak masuk pada hal-hal teknis yang mana kewenangannya sudah diatur tersendiri sesuai ketentuan yang ada,” kata Jan Sariwating.

Jan Sariwating menyebut, akibat dari pengambilalihan proyek, maka pelaksanaannya amburadul. Penyusun dokumen proyek, pelaporan perkembangan proyek, penelitian kelengkapan

Surat Perintah Pembayaran (SPP), verifikasi SPP, penyiapan Surat Perintah Membayar (SPM) yang harus dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) maupun Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) maupun Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan seperti yang diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, semuanya itu telah dilanggar oleh Sekretariat Pemkot Ambon. “Semua proses pembayaran atas proyek ini, hanya ditangani oleh satu tangan yaitu bendahara pengeluaran,” ujar Jan Sariwating.

Selain itu, kata Jan Sariwating, Toko M3 Digital Printing yang mengerjakan pencetakan baliho dan spanduk diragukan keberadaannya. Pasalnya, setelah dicek di lapangan tidak diketahui siapa pemiliknya, bahkan alamatnya juga kabur. Nota pembayaran yang disodorkan kepada sekretariat bukan nota asli dari toko. “Jadi apa yang dilakukan sekretariat kota telah melenceng jauh dari tupoksi yang diamanatkan oleh pemerintah, dimana dalam penggunaan anggaran harus efisien, terarah serta dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.

Sumber Berita:

Siwalimanews.com, Soal Dugaan Korupsi Baliho, Sekot Menghindar, 12 Oktober 2020
<https://siwalimanews.com/soal-dugaan-korupsi-baliho-sekot-menghindar/> [diakses pada 12 Oktober 2020].

Catatan:

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Jenis-jenis tindak pidana korupsi adalah:
 - a. secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
 - b. menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
 - c. memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingiat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut.

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1), menyebutkan bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, mengatur bahwa:
 - a. Pasal 1 angka 22: Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
 - b. Pasal 59 ayat (1): Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Pasal 59 ayat (2): Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut.